

Pengangguran Terdidik Semakin Banyak, Bagaimana Solusi Islam?

Sri Barliani Wati
Pemerhati Umat

Lulusan Perguruan Tinggi dan memperoleh gelar sarjana semestinya menjadi bekal bagi generasi untuk berkontribusi dalam pembangunan sekaligus memperoleh kehidupan yang layak. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur semakin banyak dan terus menjadi perhatian. Lapangan kerja formal yang membutuhkan keahlian tinggi, yaitu sarjana baik strata 1, 2 maupun 3 belum mampu tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah lulusan perguruan tinggi.

Kondisi ini terlihat dalam berbagai event bursa kerja/job fair yang seharusnya menjadi sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan justru dipenuhi oleh para pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Membludaknya pencari kerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah struktural yang membutuhkan penanganan serius.

BPS mengumumkan secara resmi keadaan ketenagakerjaan bulan Mei 2026, bersama-sama dengan rilis keadaan perekonomian Indonesia triwulan 2 tahun 2026. Sebagaimana diumumkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 4,65% berbarengan pertumbuhan ekonomi yang dikatakan “cukup baik” pada angka 5,29%. Dari total 7,22 juta orang penduduk yang menganggur Mei 2026, 14,31% diantaranya berpendidikan Sarjana, atau sekitar 1,03 juta orang. Jika ditelusuri beberapa tahun terakhir, meskipun jumlah penganggur terus menurun (dari 7,99 juta pada Februari 2023 dan 7,28 pada Februari 2025), jumlah penganggur sarjana justru terus meningkat (dari 0,75 juta pada Februari 2023 dan 1,01 juta pada Februari 2025). *link-and-match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dinilai tidak berjalan dengan baik di Indonesia, adalah hal yang sudah menjadi pengetahuan bersama dan menjadi isu sejak lama, meskipun belum bisa kita tangani dengan baik. Kondisi ini sungguh menjadi agenda serius pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah pernah menyampaikan target penciptaan sekitar 19 juta lapangan kerja. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga diharapkan mampu membuka kesempatan kerja. Namun, bagi lulusan perguruan tinggi, keberadaan program tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, terutama pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan yang dimiliki.

Secara data pertumbuhan ekonomi cukup baik yaitu sekitar 5,29%, namun pertumbuhan ekonomi yang baik tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan kesempatan kerja. Bahkan, di tengah narasi pertumbuhan ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor. Artinya, keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga harus dipertanyakan, mengapa pertumbuhan tersebut belum mampu menciptakan kesejahteraan dan pekerjaan bagi Masyarakat.

Sistem ekonomi kapitalis menjadikan pertumbuhan dan akumulasi kekayaan sebagai salah satu orientasi utamanya. Dalam kapitalisme, aktivitas ekonomi sangat erat dengan kepentingan memperoleh keuntungan dan memperbesar modal. Akibatnya, keberhasilan ekonomi sering kali tercermin melalui indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi, sementara persoalan pemenuhan kebutuhan setiap individu dapat terpinggirkan.

Hubungan antara masyarakat sebagai pekerja dan pemilik modal pun pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan. Ketika biaya tenaga kerja dianggap membebani perusahaan, maka PHK dapat menjadi pilihan. Sistem ini tidak secara mendasar menjadikan terjaminnya pekerjaan dan kebutuhan hidup setiap individu sebagai tanggung jawab negara.

Sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negara hari ini memberikan ruang yang luas kepada mekanisme pasar dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Negara hanya berfungsi sebagai pembuat regulasi dan fasilitator iklim investasi. Akibatnya, ketika pasar tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, masyarakat dapat menghadapi pengangguran tanpa jaminan bahwa negara akan secara langsung menyediakan pekerjaan bagi mereka.

Persoalan lain negara kapitalis adalah pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan berupa minyak, gas, mineral, batu bara, hutan, dan berbagai sumber daya strategis hanya menjadi objek investasi dan eksploitasi perusahaan swasta asing dan aseng yang tidak berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Seharusnya, jika kekayaan tersebut dikelola dengan orientasi kemaslahatan rakyat, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik, mengembangkan industri, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Selanjutnya Islam memiliki paradigma ekonomi yang khas. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi dinilai dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara layak dan kesejahteraan yang dapat dicapai oleh individu per individu, bukan diukur secara makro ekonomi untuk mengukur tingkat pertumbuhan.

Negara dengan sistem ekonomi Islam bertanggung jawab memastikan rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan ini salah satunya dapat dipenuhi dengan bekerja. Dalam pandangan Islam, penguasa adalah *raa'in* yaitu pengurus dan

pelindung rakyat. Dengan demikian, persoalan pengangguran tidak semata-mata dibebankan kepada individu, tetapi menjadi tanggung jawab negara dalam mengurus urusan masyarakat.

Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negaranya mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Negara juga dapat mengembangkan berbagai sektor industri strategis dari pengelolaan sumber daya alam sehingga tersedia lapangan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Pengelolaan kekayaan alam secara amanah dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan sekaligus penggerak berbagai sektor ekonomi. Industri energi, pertambangan, pengolahan hasil hutan, pembangunan infrastruktur, dan sektor strategis lainnya dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat luas kepada masyarakat, termasuk melalui penciptaan kesempatan kerja.

Dengan demikian persoalan satu juta lebih sarjana yang menganggur seharusnya tidak hanya dengan memperbanyak seminar, job fair, atau program pelatihan. Yang lebih mendasar adalah mempertanyakan sistem ekonomi yang menjadi landasan pengelolaan negara.

Islam memandang penyelesaian pengangguran membutuhkan perubahan paradigma dari ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan menuju sistem yang menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai syariat, pembangunan industri strategis, pendidikan yang tepat guna, serta kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi pekerja, negara dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih menjamin kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberadaan jutaan sarjana yang belum memperoleh pekerjaan bukan sekadar persoalan ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri. Ia merupakan cermin bagaimana sebuah sistem menempatkan rakyat dan sumber daya ekonomi. Islam menawarkan paradigma yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus dan menjamin kemaslahatan masyarakat berdasarkan syariat Islam.